



**REPRESENTASI IDEOLOGI  
DALAM TUTURAN SANTUN PEJABAT NEGARA  
PADA *TALK SHOW* MATA NAJWA**

**TESIS**

**diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister Pendidikan**

**Oleh  
Caecilia Petra Gading May Widyawari  
0202513033**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2016**

PENGESAHAN UJIAN I<sup>ESJS</sup>

Tesis dengan judul "Represensi Ideologi dalam Tattva Sstantun Ilir Pejabat Nersara pada Tattva Mata Nilwa' Wyo.

nama Coccilia Petra Ciading May Widawori  
-0202SI3033

Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, S-2

Idah dipncalabn dalam Sidang Paaili & Ujian Tcois PrOSI 'Jn l'ajcuao)ana.  
Un;.....;w N<s<ri Scmanng podahari lWiis, Wlgall 2 Mei 2016

Semarang

Panida Ujiu

Kerua,

Sekretaris,

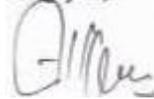
Pro( D/;k ::J:M'l'd  
NIP 19S90301198SIHOOI

  
Dr. Ihri Bakti Mardibntoro, M Ilum.  
IUP196707261993031004

P<ft!!Uji I,

Penguji II,

Dr. B. Whyucli JokoS, M Hwn  
NIP 196110261991081001

  
Dr. Ida Zulatha, M.thun.  
NIP 197001091994032001

Penguji III,



Pro( Dr. Subyamoro, M. Rum  
NIP 196802131992031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Deogoro menyatakan bahwa tulisan dalam tesis ini benar-benar karya sendiri, bukan jiplak atau tiruan. Tidak ada unsur plagiasi atau penjiplakan dalam karya ini. Apabila terdapat unsur plagiasi atau penjiplakan, baik langsung atau tidak langsung, penulis bersedia menanggung risiko hukum yang ditimbulkan apabila terdapat pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 11 April 2016

Yang membuat pernyataan,



Cecilia Petra Gading May Widyawari  
NIM 0202513033

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Moto:**

Ideologi yang jujur tercermin dalam kesantunan bertutur

### **Persembahan:**

Karya ilmiah ini dipersembahkan kepada orang tua dan almamater

## ABSTRAK

**Widyawari, Caecilia Petra Gading May.** 2016. “Representasi Ideologi dalam Tuturan Santun Para Pejabat Negara pada *Talk Show* Mata Najwa”. *Tesis*. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Program Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum., Pembimbing II Dr. Ida Zulaeha, M.Hum.

**Kata kunci:** ideologi, pejabat negara, representasi, tuturan santun.

Pengguna bahasa yang wajib bertutur santun salah satunya adalah pejabat negara. Pejabat baru seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Ganjar Pranowo telah memiliki daya tarik di mata masyarakat Indonesia baik dari segi integritas, kinerja, pola pikir, ideologi, maupun perilaku berbahasa. Salah satu wujud konkret dari struktur berpikir para pejabat tersebut berupa tuturan santun yang dapat diamati melalui program *talk show* Mata Najwa. Pemahaman maksud tuturan santun para pejabat sebagai upaya merekonstruksi ideologi apa yang direpresentasikan ketika mereka memroduksi tuturannya.

Penelitian ini difokuskan pada kajian representasi ideologi dalam tuturan santun para pejabat negara pada *talk show* Mata Najwa. Bertolak pada fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini meliputi (1) mengidentifikasi wujud kesantunan, (2) mengidentifikasi dimensi tuturan, (3) mendeskripsikan praktik kesantunan bertutur, (4) mengeksplanasikan alasan pejabat negara bertutur, (5) menjelaskan keterkaitan wujud kesantunan, dimensi tuturan, praktik kesantunan, dan alasan bertutur dengan representasi ideologi para pejabat negara dalam *talk show* Mata Najwa.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan kualitatif prespektif AWK Norman Fairclough. Pengumpulan data dengan metode simak dilanjutkan dengan teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat serta wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan metode normatif untuk menganalisis tuturan santun dan AWK Fairclough yang terdiri atas tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Pada tahap interpretasi dilengkapi aspek kognisi sosial pemikiran Van Dijk. Kognisi sosial berupa kesadaran mental penutur yang berkaitan dengan latar belakang pengetahuan yang dimiliki.

Hasil penelitian ini meliputi (1) wujud kesantunan tuturan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Ganjar Pranowo cenderung dominan mematuhi

bidal ketimbangrasaan sebab dalam tuturan, mereka berusaha memaksimalkan keuntungan secara bijaksana dengan tidak mementingkan diri sendiri dan meminimalkan biaya sosial. (2) dimensi tuturan ketiga pejabat berupa kosakata, gramatika dan struktur tekstual. Namun, terdapat perbedaan, untuk dimensi tuturan Jokowi cenderung dominan penyusunan kata, kelebihan kata, modalitas ‘keteramalan’. Sementara dimensi tuturan Ahok cenderung dominan kata informal dan modalitas ‘keharusan’. Dimensi tuturan Ganjar cenderung dominan penggunaan metafora, ekspresi eufemistik, kata formal dan informal, modalitas ‘kepastian’. Ketiga tokoh tersebut ditemukan pula pendayagunaan kosakata yang digunakan secara ideologis, evaluasi positif; gramatika berupa ketransitifan, kalimat negatif, kalimat aktif, modus deklaratif, pronimina ‘saya’ serta struktur teks eksposisi. Dimensi tutur didayagunakan para tokoh sebagai upaya menyampaikan maksud bertutur dan ideologi mereka. (3) praktik kesantunan ketiga pejabat berupa interpretasi dari penutur cenderung menunjukkan maksud yaitu kepedulian kepada rakyat, kejujuran, keadilan, penghormatan kepada rekan kerja dan pendukung, kinerja yang baik, dan kerendahatian. Adapula loyalitas terhadap partai ditemukan dalam tuturan Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Hal tersebut disebabkan tuturan para tokoh mengarah pada keberpihakan kepada rakyat. Dari segi publik interpretasi cenderung berpihak dengan ketiga pejabat tersebut. (4) alasan bertutur ketiga pejabat dalam *talk show* Mata Najwa dapat dipengaruhi oleh faktor situasional, institusional, sosiokultural. (5) wujud kesantunan, dimensi tuturan, praktik kesantunan, dan alasan bertutur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Ganjar Pranowo dapat menunjukkan representasi ideologi mereka yaitu ideologi kerakyatan.

Saran yang dapat disampaikan sebagai berikut. (1) peneliti lain yang tertarik dengan topik penulis, disarankan untuk melanjutkan penelitian ini sebagai kajian perbandingan representasi ideologi dengan subjek yang berbeda misalnya hakim, polisi, wartawan, (2) tuturan para pejabat negara masih memungkinkan untuk diteliti lebih lanjut, tidak sebatas pada representasi ideologi, dapat pula analisis dari aspek daya pragmatik, implikatur, representasi kekuasaan dll, serta tidak sebatas dalam ranah *talk show* televisi saja, dapat pula dalam ranah berita, tajuk rencana, surat pembaca di media cetak, artikel berita di media online, pengamatan tuturan secara langsung.

## ABSTRACT

**Widyawari, Caecilia Petra Gading May.** 2016. "Representasi Ideologi dalam Tuturan Santun Para Pejabat Negara pada Mata Najwa Talk Show ". Thesis. Indonesian Education Program. Postgraduate Program. Semarang State University. Advisor I Prof. Dr. Subyantoro, M. Hum., Advisor II Dr. Ida Zulaeha, Hum.

**Keywords:** ideology, officer, representation, polite utterance.

One of the speakers who are required to speak politely is an officer. The new officers such as Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama or Ahok, and Ganjar Pranowo have their own special attraction in the Indonesian society in terms of integrity, performance, mindset, ideology, and language behavior. One of the concrete form of the structure of thinking those officials in the form of polite speech can be observed through a talk show program Mata Najwa. Understanding the purpose of speech mannered officials as an attempt to reconstruct the ideology of what is represented when they produce utterances.

This research focused on the research of the ideological representation in polite utterances of officers on the talk show "Mata Najwa". Contrary to the focus of the research, the purposes of this research were (1) identifying the politeness form, (2) identifying the dimension form, (3) describing the practice of politeness in speaking, (4) explaining the officers' reasons to speak, (5) describing the relation of politeness form, utterance dimension, politeness practice, and reasons to speak in the ideological representation of the officers on talk show "Mata Najwa".

The approach of this research is qualitative perspective of CDA Fairclough. The data were collected by using an observation method and was continued the technique of SBLC (simak bebas libat cakap) and note technique (teknik catat), interviews, and literature. Data analysis was performed with the normative methods for analyzing speech polite and CDA Fairclough consisting of stages of description, interpretation, and explanation. In the interpretation stage include aspects of social cognition van Dijk. Social cognition in the form of mental awareness speakers associated with the background knowledge.

The results of this research were (1) the utterance politeness of Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama or Ahok, and Ganjar Pranowo adhere to the tact maxim tends to be dominant because in speech, they try to maximize profits wisely with selflessness and minimize social costs. (2) the utterance dimensions of three figures were vocabulary, grammar and textual structure. However, there were differences for the utterance dimensions of Jokowi that tended to be dominated by, phrasing, words excess, and the modalities of 'predictability'. While the utterance dimensions of Ahok tended to be dominated by informal words, and the modalities of 'necessity'. The utterance dimensions of Ganjar tended to be dominated by the use of metaphor, euphemistic expression, formal and informal words, and the modalities of 'certainty'. The three officer's also found the vocabulary used ideologically, positive evaluations; grammatical form of transitivity, negative sentences, active sentences, declarative mode, pronomina 'saya'; and structure of the text exposition. The utterance dimensions of three figures empowered in an effort to convey meaning and ideology. (3) the politeness practice of three figures was interpretation of speakers tend to show a hidden purpose that is of concern to the people, honesty, justice, respect for colleagues and supporters, good performance, and humility. There is also a loyalty to the party found in speech Joko Widodo and Ganjar Pranowo. This caused the utterance of three figures leads to partiality to the people. In terms of public interpretation tends pro with the three officials. (4) the reasons to speak of three figures in Mata Najwa talk show could be affected by such factors that were situational, institutional, sociocultural. (5) the politeness form, the utterance dimensions, the politeness practice and reasons to speak of three figures can show a representation of their ideology is the ideology of pro with the people.

The suggestions that could be given are as follows. (1) for researchers who are interested in this topic, it is advisable to continue this research as a comparative study of ideology representation to a different subject eg, judges, police, journalists, (2) the utterance of the officers still allow for further investigation, it is not limited to the representation of ideology can an analysis of aspects of power pragmatic, implicatures, the representation of power, etc and not limited in the field of talk show in television, can also be in the realm of news, editorials, letters to the print media, news articles in online media, observation of speech directly.

## PRAKATA

Segala puji syukur kehadirat Allah Yang Mahakuasa. yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Berkat karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Representasi Ideologi dalam Tuturan Santun Para Pejabat Negara pada *Talk Show* Mata Najwa”. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari pelbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para pembimbing: Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum. (Pembimbing I) dan Dr. Ida Zulaeha, M.Hum. (Pembimbing II). Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian studi, di antaranya:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas belajar dari awal sampai akhir;
2. Direksi Program Pascasarjana Unnes, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian, dan penulisan tesis ini.
3. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana Unnes yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam penulisan tesis ini.

4. Dosen penguji Proposal Tesis Dr. Hari Bakti Mardikantoro, M.Hum, dosen penguji Draf Tesis dan Tesis Dr. B. Wahyudi Joko Santoso, M.Hum yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana Unnes, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
6. Kedua orangtua, Alexandre Suramto dan Theresia Nur Istyani yang senantiasa menjadi motivasi dalam menyelesaikan studi.
7. Kakak Gregorius Advent Gilang Arlingga, Adik Yohanes Febri Bagas Pamungkas, dan keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat.
8. Sahabat-sahabat di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Pascasarjana Unnes.
9. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Peneliti sadar bahwa dalam tesis ini masih terdapat kekurangan, baik isi maupun tulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan merupakan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, Maret 2016

Caecilia Petra Gading May Widyawari

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PENGESAHAN UJIAN TESIS</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>PRAKATA</b> .....	
viii	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	11
1.3 Cakupan Masalah .....	12
1.4 Rumusan Masalah .....	13
1.5 Tujuan Penelitian .....	13
1.6 Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS</b>	
2.1 Kajian Pustaka .....	15
2.2 Kerangka Teoretis .....	31
2.2.1 Tindak Tutur.....	31

2.2.2 Kesantunan Berbahasa .....	33
2.2.2.1 Prinsip Kesantunan.....	36
2.2.2.2 Alat Ukur atau Skala Kesantunan Berbahasa.....	41
2.2.2.3 Strategi Kesantunan .....	44
2.2.3 Konteks Tuturan.....	51
2.2.4 <i>Talk Show</i> .....	56
2.2.5 Pejabat Negara .....	58
2.2.6 Ideologi .....	60
2.2.7 Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough .....	62
2.2.8 Kerangka Berpikir.....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan Penelitian .....	72
3.2 Fokus Penelitian .....	73
3.3 Data dan Sumber Data .....	73
3.3.1 Data dan Sumber Data Primer .....	73
3.3.2 Data dan Sumber Data Sekunder .....	74
3.4 Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	74
3.5 Teknik Keabsahan Data .....	76
3.6 Teknik Analisis Data.....	77
<b>BAB IV WUJUD KESANTUNAN, PRAKTIK KESANTUNAN, DIMENSI TUTURAN, ALASAN PARA PEJABAT BERTUTUR, DAN KETERKAITAN DENGAN IDEOLOGI</b>	
4.1 Wujud Kesantunan Tuturan Para Pejabat Negara dalam <i>Talk Show</i> Mata Najwa .....	79
4.1.1 Pematuhan Bidal Ketimbangrasaan .....	80
4.1.2 Pematuhan Bidal Keperkenaan .....	83
4.1.3 Pematuhan Bidal Kerendahatian .....	85
4.1.4 Pematuhan Bidal Kesetujuan .....	88
4.1.5 Pematuhan Bidal Kesimpatian .....	91

4.2	Dimensi Tuturan Para Pejabat Negara dalam <i>Talk Show</i> Mata Najwa.....	94
4.2.1	Kosakata Tuturan Para Pejabat dalam <i>Talk Show</i> Mata Najwa .....	94
4.2.1.1	Kata-Kata yang Digunakan secara Ideologis .....	94
4.2.1.2	Kata Formal dan Informal .....	97
4.2.1.3	Penyusunan Kata dan Kelebihan Kata .....	103
4.2.1.4	Metafora .....	105
4.2.1.5	Ekspresi Eufemistik .....	109
4.2.1.6	Evaluasi Positif dan Negatif .....	110
4.2.2	Gramatika .....	114
4.2.2.1	Ketransitifan .....	115
4.2.2.2	Pilihan Kalimat Aktif-Pasif .....	117
4.2.2.3	Kalimat Positif dan Negatif .....	121
4.2.2.4	Modus Kalimat .....	124
4.2.2.5	Modalitas .....	133
4.2.2.3	Strategi Kehadiran Diri .....	142
4.2.3	Struktur Tekstual .....	147
4.3	Praktik Kesantunan Bertutur Para Pejabat Negara dalam <i>Talk Show</i> Mata Najwa .....	155
4.3.1	Produksi Tuturan Para Pejabat .....	156
4.3.2	Konsumsi Tuturan Para Pejabat .....	183
4.4	Alasan Para Pejabat Negara Bertutur dalam <i>Talk Show</i> Mata Najwa .....	188
4.4.1	Aspek Situasional .....	188
4.4.2	Aspek Institusional .....	192
4.4.3	Aspek Sosial .....	197
4.5	Keterkaitan Wujud Kesantunan, Dimensi Tuturan, Praktik Kesantunan, dan Alasan Bertutur dengan Ideologi Para Pejabat Negara .....	209
4.5.1	Keterkaitan Wujud Kesantunan dengan Ideologi Para Pejabat .....	210
4.5.2	Keterkaitan Dimensi Tuturan dengan Ideologi Para Pejabat .....	211
4.5.3	Keterkaitan Praktik Kesantunan dengan Ideologi Para Pejabat .....	214

4.5.4 Keterkaitan Alasan Bertutur dengan Ideologi Para Pejabat .....	218
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	226
5.2 Saran .....	228
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>229</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>235</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Indikator Kesantunan dalam Topik Pertemuan NonPBM	43
Tabel 2.2 Dimensi Teks.....	64
Tabel 4.1 Ketransitifan.....	115

## DAFTAR BAGAN

	<b>Halaman</b>
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tuturan merupakan hasil dari realisasi pikiran dan ide manusia yang berasal dari penggunaan serangkaian alat ucap. Sejalan dengan hal tersebut, secara sederhana Sudaryanto (1993:23-24) dan Brown & Yule (1996:19) menyatakan bahwa tuturan merupakan bahasa yang diucapkan atau diujarkan. Sebagai bahasa yang diujarkan, tuturan memiliki peran salah satunya merepresentasikan ideologi para pengguna bahasa. Hal tersebut ditegaskan oleh Vološinov sebagaimana dikutip Sosiowati (2013) bahwa bahasa tidak bisa lepas dari ideologi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ideologi dan bahasa seperti dua sisi mata uang. Artinya, bahasa digunakan untuk merepresentasikan ideologi dan ideologi dapat dipahami melalui penggunaan bahasa salah satunya berupa tuturan. Sosiowati (2013) menyatakan karena semua penggunaan bahasa mempunyai maksud tertentu, ideologi dapat disamakan dengan maksud. Menurut Raymon William sebagaimana dikutip Eriyanto (2006:87-88) ideologi dimaknai salah satunya sebagai proses produksi makna dan ide. Ideologi dipandang sebagai suatu ide dasar yang diyakini pengguna bahasa. Dalam hal ini, ideologi sebagai suatu ide yang diyakini dan sebagai suatu maksud dari para pengguna bahasa dapat dikonstruksi dalam bentuk tuturan.

Ideologi yang dikonstruksi dalam tuturan pengguna bahasa memberikan dampak utamanya dalam hal kepercayaan dan kepatuhan. Eriyanti (2014)

berpendapat melalui penanaman ideologi tertentu, orang lain bisa menjadi patuh tanpa harus mempertanyakan sesuatu yang dianggap wajar dan masuk akal. Adanya kepercayaan dan kepatuhan dari orang lain menunjukkan bahwa ideologi telah berhasil disampaikan. Agar ideologi dapat tersampaikan dengan mudah salah satunya melalui tuturan yang dituturkan secara santun.

Tuturan yang dituturkan secara santun selain memudahkan penanaman ideologi juga dapat menjaga keharmonisan dalam aktivitas berkomunikasi. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Wibowo (2013) bahwa ketika sedang berkomunikasi, terdapat istilah yang menjadi dasar untuk menjaga keharmonisan hubungan antara penutur dengan mitra tutur, yaitu kesantunan (*politeness*). Menurut Yuni (2013) kesantunan berbahasa merupakan sikap hormat penutur kepada mitra tutur yang diwujudkan dalam tuturan yang sopan dan tuturan yang sopan dilahirkan dari sikap yang hormat pula.

Senada dengan hal tersebut, santun dalam berbahasa harus dikuasai dan diaplikasikan oleh semua orang di pelbagai bidang kehidupan. Salah satu individu yang harus berbahasa santun bahasa Indonesia yaitu para pejabat negara. Apabila mengacu pada isi Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV Pasal 36 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 28 dan 29 pengguna Bahasa Indonesia secara umum adalah semua warga negara Indonesia, sedangkan secara khusus adalah Presiden, Wakil Presiden, pejabat negara yang lain, dan lembaga pendidikan nasional. Badudu sebagaimana dikutip Muji (2013) berpendapat tentang siapakah pengguna Bahasa Indonesia yang perlu diteladani dalam peristiwa komunikasi adalah penyiar berita di radio, penyiar berita di

televisi, pejabat negara, dan pemimpin masyarakat/tokoh masyarakat. Dapat dikatakan mereka yang menjabat sebagai pejabat negara harus menunjukkan perilaku berbahasa yang baik dan santun.

Sehubungan dengan pejabat Indonesia, sekarang ini ada fenomena pejabat negara yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Mereka mendatangi masyarakat, melihat secara langsung kondisi masyarakat yang sering dikenal dengan istilah “blusukan”. Seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan Tri Rismaharini. Selain itu, pelbagai media gencar pula memberitakan mereka dan banyak program televisi yang mengundang mereka sebagai narasumber. Salah satu program televisi yang mengundang para pejabat negara adalah Mata Najwa, sebuah program *talk show* unggulan Metro TV yang dipandu oleh jurnalis senior, Najwa Shihab. Mata Najwa ditayangkan oleh Metro TV hari rabu pukul 20.00 WIB.

Pada acara *talk show* Mata Najwa dibahas pelbagai isu politik hangat dan terkini yang diulas secara mendalam. Hal ini sejalan dengan pendapat Shihab sebagaimana dikutip Effendy (2015:12) Mata Najwa adalah sebetuk persuasi untuk melakukan refleksi kritis terhadap pelbagai praktik politik dengan penglihatan yang lebih tajam. Selain itu, tim Mata Najwa sering menghadirkan pelbagai narasumber termasuk pejabat negara yang kompeten dan relevan terkait topik yang sedang dibahas. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syaifudin (2013) bahwa Mata Najwa merupakan tontonan yang layak diperhitungkan. Hal ini dikarenakan Mata Najwa memuat nilai edukatif yang tinggi. Banyak tokoh dan elite politik diundang dalam *talk show* Mata Najwa. Mata Najwa pun memiliki

*rating* yang tinggi, banyak minat dari masyarakat dalam menonton acara tersebut. Profil *talk show* Mata Najwa yang juga dapat dilihat pada website Mata Najwa.

Berdasarkan profil dapat dikatakan bahwa *talk show* Mata Najwa termasuk program televisi yang berkualitas dengan banyak penghargaan yang telah diperoleh. Selain itu, banyak pejabat telah dihadirkan sebagai narasumber. Selain melihat *talk show* Mata Najwa melalui televisi, masyarakat dewasa ini dapat mengakses acara tersebut dengan membuka alamat website [www.matanajwa.com](http://www.matanajwa.com) atau [www.youtube.com](http://www.youtube.com). Dengan mengakses website tersebut, masyarakat dapat melihat bahkan mengunduh acara Mata Najwa yang telah disiarkan di televisi sebelumnya. Tayangan ulang yang diunggah dalam website sama dengan tayangan yang disiarkan di televisi sehingga masyarakat dapat menonton tayangan secara utuh tanpa mengurangi inti dari isi tayangan. Dalam hal ini, akan sangat mudah bagi masyarakat untuk melihat bagaimana para pejabat negara bertutur ketika menjadi narasumber dalam *talk show* Mata Najwa.

Setiap narasumber yang diundang di *talk show* Mata Najwa akan disuguhkan satu topik yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Kadang satu narasumber untuk satu episode, dapat pula beberapa narasumber dalam satu episode itu. Mereka akan berdialog, saling bertukar pendapat dan informasi berdasarkan topik yang telah dipilih. Sosiowati (2013) menyatakan melalui media *talk show* para narasumber mengemukakan ideologi secara tersurat atau tersirat dan mempertahankannya atau dengan kata lain mereka melakukan perang ideologi di media tersebut. Ideologi narasumber disampaikan melalui bahasa yang sedemikian rupa agar dapat mempengaruhi masyarakatnya. Sama halnya ketika

para pejabat negara menjadi narasumber dalam *talk show*, mereka sebagai pemimpin, teladan masyarakat, bahkan bisa jadi sebagai politisi pasti membawa ideologi tertentu.

Sebagai seorang pemimpin, pejabat negara memiliki peran menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai undang-undang, memimpin masyarakat dan bawahannya dengan baik, menjembatani antara pemerintah dan masyarakatnya, dan mengayomi serta menyejahterakan masyarakatnya. Sebagai teladan masyarakat, pejabat negara berperan memberikan contoh dalam hal berperilaku dan berbahasa sesuai norma dan budaya yang ada. Peran pejabat negara sebagai seorang politisi dengan menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan partai politik yang dianut, setia kepada partai dan mengikuti dan mempercayai ideologi yang diusung partai. Dengan demikian, pelbagai peran dijalankan pejabat negara dan ketika menjalankan peran tersebut, para pejabat negara dapat melancarkan ideologi atau maksud melalui tuturan mereka.

Pada dasarnya, ketika para pejabat negara bertutur itu sama halnya dengan berpolitik. Para pejabat negara menyampaikan maksud-maksud tertentu bahkan untuk melancarkan kekuasaan yang dimiliki melalui tuturannya. Adapun konteks situasi internal (dengan siapa, dimana, kapan, tentang apa) dan eksternal (sosial, politik ekonomi, dan budaya) dapat memengaruhi para pejabat negara ketika bertutur. Hal tersebut disebabkan cara bertutur dan hasil tuturan mereka menjadi salah satu faktor untuk melancarkan kekuasaan dan menyampaikan ideologi tertentu. Jadi, para pejabat negara perlu bertutur santun selain didukung dengan tingkah laku, kinerja yang profesional dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan pejabat negara, dalam lima tahun terakhir ini di Indonesia terdapat beragam pola tingkah, kinerja, rekam jejak para pejabat negara yang menjadi semacam magnet perhatian bagi masyarakatnya. Seperti Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Ganjar Pranowo. Tokoh-tokoh ini termasuk pejabat negara yang bisa dikatakan memiliki tingkat perhatian yang tinggi baik dari media maupun publik. Ketiga tokoh ini memiliki kesamaan dalam hal kinerja dan hal perilaku berbahasa. Dalam hal kinerja, ketiga tokoh ini sering melakukan sidak dan 'blusukan' untuk mengamati kondisi masyarakat secara langsung, menetapkan kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra, dan mereka selalu mengedepankan prinsip kerja tanpa peduli banyak orang yang menentang mereka. Sementara dalam hal perilaku berbahasa, ketiga tokoh ini sama-sama berbahasa apa adanya, sesuai fakta, berorientasi kepada permasalahan rakyat. Berkaitan nada suara, Ahok dan Ganjar cenderung meledak-ledak ketika berkaitan dengan ketidakbenaran.

Hal ini sejalan dengan pendapat Heryanto dan Rosyidin (2015:47) bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok gaya bicaranya cepat dan ceplis-ceplos, bicara sesuai fakta, suaranya meninggi jika berbicara tentang ketidakadilan. Menurut Pakar Komunikasi Politik dari UGM, Nyarwi Ahmad sosok Jokowi sangat polos, setiap menyampaikan sesuatu di depan publik terkesan apa adanya dan ini ternyata mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat (Irianto 2013). Hal ini diperkuat oleh pendapat Syaifudin (2013) bahwa masyarakat menilai Jokowi memiliki pribadi yang santun, baik tingkah laku maupun tindak tutur atau ucapannya. Begitu pula dengan Ganjar Pranowo, ketika bertutur Ganjar cenderung

apa adanya sesuai dengan fakta, sering bercanda, sopan dalam berbicara, dan suara akan meninggi ketika menemukan ketidakbenaran. Gaya dalam berbahasa para pejabat negara yang demikian menjadi satu hal yang menarik apabila dikaitkan dengan santun dan tidak santun dalam berbahasa.

Senada dengan hal tersebut, ketika dalam konteks para pejabat negara menjadi narasumber dalam *talk show* di televisi, mereka bertutur sedemikian rupa guna menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa acara. Tak jarang pembawa acara menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memicu emosi narasumbernya, sehingga terdapat tuturan-tuturan yang di luar dugaan. Seperti pada hasil analisis Syaifudin (2013) wawancara Najwa dengan Jokowi episode (“Sang Penantang”) berikut.

*Nana : Pak Jokowi, Anda dituding ni, hanya bermain citra. Keberhasilan yang ada di Solo itu di ... sebatas digembar-gemborkan berbeda dengan realitas bahkan mantan ketua MPR, Amin Rais itu predikat walikota terbaik di dunia itu menyesatkan. Ini hanya citra saja ni Joko Widodo?*

*Jokowi : Hehehe. Itu yang kalau boleh yang salah itu kan media, saya itu hanya bekerja kok. Saya bekerja, iya kan? Kemudian ada hasil. Saya bekerja kemudian ada hasil. Kalau apa media memberitakan itu silahkan media. Wong saya ndak minta diberitakan, apalagi bayar. Serupiah pun saya ndak pernah bayar.*

Penggalan dialog tersebut Jokowi tidak serta merta memberikan klarifikasi bahwa beliau hanya bekerja dan tidak pernah meminta diberitakan, tetapi dialog tersebut mengandung makna “menolak” atau “tidak setuju” dengan anggapan bahwa beliau hanya memainkan politik pencitraan. Penggunaan penanda lingual ‘ndak minta’ oleh Jokowi menunjukkan adanya penolakan apabila dikatakan hanya sebagai pencitraan. Tuturan disampaikan secara santun, ditandai dengan

adanya pematuhan bidal kerendahatian. Hal tersebut ditunjukkan pada penggalan “saya hanya bekerja”. Jokowi meminimalkan pujian terhadap dirinya sendiri. Terdapat penyusunan kata kembali “bekerja dan hasil” merujuk pada upaya Jokowi menyampaikan tuturannya secara sungguh-sungguh. Adanya klarifikasi dari Jokowi sebagai upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap anggapan negatif yang ditujukan kepada Jokowi.

Penggalan lain dapat dilihat dari tuturan Ahok dalam episode “Pertaruhan Jokowi-Ahok”

*Najwa: Pak Ahok saya ingat, dan ini saya quote langsung. Jadi saya nggak ngarang-ngarang ni pak ya. Anda waktu itu sempat marah sekali, pada saat ada hibah bis perusahaan swasta yang dipersulit, Anda bilang kalo saya gubernur akan saya pecat-pecatin tu semua. Betul, ini betul lho pak! Saya nyatet, betul paling susah tu jadi wakil, wakil itu gak berhak tanda tangan dan tidak mudah harus selalu lapor pada pak gubernur?*

*Ahok: Iya, memang itu Undang-Undang 32 Tahun 2004 wakil kepala daerah itu tidak punya wewenang hanya punya tugas dan kewajiban. Apa tugas dan kewajiban seorang wakil adalah membuat kepala menjadi sukses. Itu yang saya sampaikan pada waktu kampanye. Sebetulnya bukan sayanya, tapi konstitusi itu ya kalo ngerti jadi wakil ya itu gak ada wewenang.*

Penggalan dialog tersebut menunjukkan Ahok memberikan konfirmasi bahwa sebagai wakil kepala daerah tidak memiliki kuasa apa-apa. Terdapat penegasan bahwa sebagai wakil kepala daerah harus mematuhi dan menjalankan undang-undang. Dalam penggalan terdapat penggunaan kosakata formal berupa frasa ‘Undang-Undang 32 Tahun 2004’ oleh Ahok yang mengarah pada penegasannya terkait peraturan untuk wakil kepala daerah. Selain itu, Ahok mendukung penuh pasangannya yaitu Jokowi sebagai gubernur Jakarta yang terlihat dalam

pendayagunaan metafora berupa ‘membuat kepala menjadi sukses’. Dalam hal ini, dapat dikatakan Ahok mematuhi bidal ketimbangrasaan. Ahok menyampaikan pendapatnya sesuai fakta dan meminimalkan ketersinggungan bagi mitra tutur yang dibicarakannya. Dari konfirmasi Ahok tersebut, Ahok secara eksplisit menunjukkan kinerjanya yang patuh pada peraturan undang-undang.

Berdasarkan penggalan dialog tersebut terlihat bahwa terdapat penggunaan prinsip kesantunan dan strategi bertutur yang dilakukan pejabat negara ketika diwawancara oleh Najwa Syihab. Tidak menutup kemungkinan ideologi ditanamkan melalui tuturan para pejabat negara itu. Berkaitan dengan hal tersebut, Yuni (2013) berpendapat profil kultural masyarakat Indonesia adalah paternalistik, masyarakat masih meniru atau mencontoh tingkah laku para pejabat atau tokoh-tokoh penting. Maka seharusnya para pejabat negara itu memberi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat khususnya dalam hal kebiasaan bertutur agar masyarakatnya dapat berbahasa dengan baik pula.

Sesuai dengan paparan tersebut, analisis tuturan para pejabat negara penting untuk dilakukan. Untuk menganalisis tuturan pejabat negara ini dilakukan dengan analisis wacana kritis. Pada analisis wacana kritis, bahasa tidak dipandang dalam pengertian linguistik tradisional dan wacana tidak dipahami semata-mata sebagai objek studi bahasa. Seperti pendapat Darma (2013:49-50) bahwa bahasa dalam analisis wacana kritis selain pada teks juga pada konteks bahasa sebagai alat yang dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk praktik ideologi. Dapat dikatakan bahasa dan konteks bahasa bersama-sama digunakan sebagai media melancarkan praktik ideologi tertentu. Analisis wacana kritis melihat wacana

(pemakaian bahasa dalam tutur dan tulisan) sebagai bentuk dari praktik sosial (Fairclough dan Wodak, 1997:55, Wodak 1996:15, Titscher *et al* 2000:147, Eriyanto 2012:7). Dalam hal ini, interaksi verbal para pejabat negara dalam *talk show* Mata Najwa termasuk bentuk praktik sosial. Terlebih, para pejabat negara akan memiliki akses yang mudah dalam menyampaikan ideologinya dan melancarkan kekuasaan yang dimiliki ketika bertutur dalam *talk show live* di acara televisi tersebut.

Analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis wacana kritis ancangan Norman Fairclough. Sesuai dengan Jorgensen dan Philip sebagaimana dikutip Fitrianita (2013) pendekatan Fairclough ini dianggap sebagai teori dan metode dalam CDA yang paling maju (sempurna) dibanding dengan pendekatan lainnya. Selain itu, Darma (2013:89) menyatakan titik perhatian Fairclough adalah melihat bagaimana pemakai bahasa membawa ideologi tertentu. Fairclough (1989:26) membagi analisis wacana dalam tiga tahap yaitu *deskripsi* merupakan tingkatan yang berhubungan dengan sifat formal teks. *Interpretasi* berkaitan dengan hubungan antara teks dan interaksi yang melihat teks sebagai suatu produk proses produksi, dan sebagai sumber dalam proses interpretasi. *Eksplanasi* berkaitan dengan interaksi dan konteks sosial, dengan tekad sosial dari proses produksi dan interpretasi, dan efek sosial mereka.

Ketiga tahapan tersebut digunakan untuk mengungkapkan wujud kesantunan dan dimensi tuturan santun para pejabat negara, menginterpretasi produksi dan konsumsi tuturan, mengeksplanasi praktik kesantunan serta untuk mengungkapkan ideologi ketiga pejabat tersebut. Kecenderungan tuturan para

pejabat multitafsir dipahami oleh masyarakat sehingga dengan mengetahui maksud tuturan pejabat, publik dapat secara kritis membuat semacam keputusan, apabila maksud pejabat positif publik dapat mengikuti, mempercayai, melaksanakan sedangkan apabila maksud pejabat negatif bisa juga tidak mempercayai tuturan pejabat tersebut. Maka, analisis wacana kritis dapat digunakan untuk menganalisis rangkaian tindak tutur para pejabat negara dan membongkar ideologi dari tuturan tersebut.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sosok pejabat negara Indonesia sekarang ini sedikit banyak telah menarik perhatian masyarakat Indonesia. Utamanya masing-masing pejabat negara itu memiliki kekhasan pribadi, pola kerja, ideologi, dan gaya bertutur yang seolah seperti magnet bagi masyarakatnya. Seperti Presiden Joko Widodo, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Walikota Bandung Ridwan Kamil, walikota Surabaya Tri Rismaharini. Hampir di media televisi, surat kabar, dan media *online* selalu memberitakan kiprah mereka.

Selain itu, dalam pelbagai acara di televisi juga mengundang mereka sebagai tamu ataupun narasumber. Seperti yang diketahui, banyak stasiun televisi di Indonesia baik stasiun televisi nasional maupun swasta yang memiliki program acara yang beraneka ragam. Salah satu acara yang bersifat informatif, menghibur, dan mendidik adalah *talk show*. Beragam *talk show* ditampilkan di televisi salah satunya Mata Najwa di Metro TV.

Berkaitan dengan bertutur, seorang pejabat menggunakan bahasa bukan hanya sekadar sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai alat kekuasaan. Sebagai alat kekuasaan, bahasa tidak hanya untuk sekadar dipahami tetapi juga untuk dipercayai, dipenuhi, dituruti, dan dihormati. Selain sebagai alat kekuasaan, bahasa digunakan para pejabat untuk menyampaikan maksud atau ideologi di balik tuturannya itu. Para pejabat negara pun berusaha untuk menghasilkan tuturan yang baik dan santun dengan strategi kesantunan bertutur tertentu. Dalam hal ini, tuturan santun sebagai wacana lisan yang dituturkan para pejabat negara dapat dimasukkan sebagai bentuk praktik sosial. Melalui analisis wacana kritis dapat diungkapkan realitas penggunaan bahasa santun yang dituturkan para pejabat negara itu dan dapat diungkapkan representasi ideologi dalam tuturan mereka.

### **1.3 Cakupan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, dalam penelitian ini dibatasi permasalahan penelitian pada wujud kesantunan, dimensi tuturan, praktik kesantunan, eksplanasi alasan para pejabat ketika mereka bertutur, dan representasi ideologi dalam tuturan santun para pejabat itu. Adapun peristiwa tutur yang dipilih dalam penelitian ini yaitu pada saat acara *talk show* Mata Najwa. Dalam penelitian ini digunakan analisis wacana kritis (AWK) Norman Fairclough. Pejabat negara yang diteliti yaitu Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Ganjar Pranowo. Pejabat negara tersebut merupakan pemimpin tertinggi di lembaga yang mereka pimpin, sering disorot media dan publik, memiliki

kesamaan dalam hal bertutur, dan pernah menjadi narasumber dalam *talk show*

Mata Najwa.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Apakah wujud kesantunan tuturan para pejabat negara dalam *talk show* Mata Najwa?
- 2) Apakah wujud dimensi tuturan para pejabat negara dalam *talk show* Mata Najwa?
- 3) Bagaimanakah praktik kesantunan bertutur para pejabat negara dalam *talk show* Mata Najwa?
- 4) Mengapa para pejabat negara bertutur demikian dalam *talk show* Mata Najwa?
- 5) Bagaimanakah keterkaitan wujud kesantunan, dimensi tuturan, praktik kesantunan, dan alasan bertutur para pejabat dengan representasi ideologi mereka?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Mengidentifikasi wujud kesantunan tuturan para pejabat negara dalam *talk show* Mata Najwa
- 2) Mengidentifikasi wujud dimensi tuturan para pejabat negara dalam *talk show* Mata Najwa
- 3) Mendeskripsikan praktik kesantunan bertutur para pejabat negara dalam *talk show* Mata Najwa

- 4) Mengeksplanasikan alasan pejabat negara bertutur dalam *talk show* Mata Najwa
- 5) Menjelaskan wujud kesantunan, dimensi tuturan, praktik kesantunan, dan alasan bertutur mendukung representasi ideologi para pejabat negara

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat secara teoretis dan praktis. Manfaat yang dapat diambil secara teoretis berupa hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan utamanya dalam kajian pragmatik, sosiopragmatik, kajian wacana dan analisis wacana kritis. Selain itu, dari penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis perihal deskripsi representasi ideologi dalam tuturan santun para pejabat negara secara kritis.

Manfaat yang dapat diambil secara praktis berupa bagi akademisi, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan bahan ajar dan referensi penelitian kajian analisis wacana, analisis wacana kritis, pragmatik, sosiopragmatik. Bagi lembaga bahasa, dapat menyusun panduan bertutur santun utamanya untuk calon pejabat. Selain itu, bagi pejabat negara dan masyarakat pada umumnya, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai analisis tuturan santun yang mengandung ideologi tertentu.